

**KINERJA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

Iqbal Fauzul Akmal
NPP 30.0244

*Asdaf Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: 085761441771bal@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Isman Hadi Jaya, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *There are 11 underdeveloped villages in Indragiri Hulu Regency, so performance improvement is needed, especially the Community and Village Empowerment Services in carrying out their main tasks and functions. Purpose:* *The general research objective is to describe the performance of improving village development at the Community and Village Empowerment Service in Indragiri Hulu Regency. To find out the factors that influence performance in improving the quality of village development at the Community and Village Empowerment Service in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. To find out the efforts made by the Community and Village Empowerment Office in overcoming problems in order to improve the quality of village development in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. Method:* *This study uses the theory of implementation of organizational performance measurement by Mustopadidjaja. The data collection technique was carried out by interviewing 16 informants. Results:* *The findings obtained by the author in this study are that access to the village is difficult and reports have also been made several times and there has been no continuation and the factor of infrastructure. Conclusion:* *In an effort to overcome obstacles to DPMD performance in improving the quality of village development, there are several things that are usually carried out, namely the head of the DPMD submits a request to the Regent to provide additional facilities and infrastructure as one of the supporting tasks and functions, with provisions such as the addition of vehicles, means of repair damaged roads, more spacious office building facilities and routine maintenance. Conduct outreach to lagging villages regarding regulations and aspects that are a requirement for increasing village status.*

Keywords: *Village, Performance, Development*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP): Adanya desa tertinggal yang jumlahnya 11 desa di Kabupaten Indragiri Hulu maka dibutuhkan peningkatan kinerja terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. **Tujuan:** Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan kinerja meningkatkan pembinaan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan kualitas pembinaan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengatasi permasalahan guna meningkatkan kualitas pembinaan desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi oleh Mustopadidjaja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yang di narasumberkan sebanyak 16 orang. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini ialah akses menuju desa yang sulit dan juga sudah dilakukan pelaporan beberapa kali laporan belum ada kelanjutannya dan faktor sarana prasarana. **Kesimpulan:** Dalam rangka upaya mengatasi hambatan kinerja DPMD dalam peningkatan kualitas pembinaan desa terdapat beberapa hal yang biasa dilaksanakan yakni kepala DPMD memberikan permohonan kepada Bupati agar dapat memberikan tambahan Sarana dan Prasarana sebagai salah satu penunjang tugas dan fungsi, dengan ketentuan seperti penambahan kendaraan, sarana perbaikan jalan yang rusak, sarana Gedung kantor yang lebih luas dan pemeliharaan rutin. Melakukan sosialisasi kepada Desa-Desa yang tertinggal tentang peraturan dan Aspek Aspek yang menjadi syarat dalam meningkatkan status Desa.

KATA KUNCI: Desa, Kinerja, Pembinaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum suatu pemerintahan memiliki 4 (empat) fungsi dalam menjalankan fungsi pemerintahannya antara lain pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan optimal demi tercapainya tujuan dari pemerintahan. Dalam hal ini yang paling utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu pelayanan melalui pemberdayaan kepada masyarakat.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu yang bertujuan untuk memenuhi syarat akuntabilitas kinerja instansi guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan asal usul adat setempat yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Indonesia, desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaannya, karna Desa yang melambangkan media pemerintah pusat sekaligus media pemerintah daerah. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas pemerintah desa sangatlah besar.

Dengan adanya desa tertinggal yang jumlahnya 11 desa di Kabupaten Indragiri Hulu maka dibutuhkan peningkatan kinerja terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan peraturan yang telah disusun, sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat dan benar. Dalam hal ini dengan memberikan pembinaan kepada desa secara maksimal sehingga tingkat kesejahteraan dan kemandirian desa dapat merata dan tidak ada lagi desa yang tertinggal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

penulis akan fokus pada kinerja dalam Meningkatkan Kualitas Pembinaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam pelayanan kepada desa maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja dalam meningkatkan kualitas pembinaan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas pembinaan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam kinerja meningkatkan kualitas pembinaan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam kinerja meningkatkan kualitas pembinaan kepada desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?

1.3 Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelitian terdahulu yang menjadi sebagai acuan inspirasi peneliti dalam melakukan penelitian yaitu yang berjudul Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah (Okky Irwanto Ajang, 2021), mengemukakan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum optimal dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di kabupaten lamandau. Penelitian Aprilianto Prasetyo menyatakan bahwa Kinerja DPMD sudah cukup baik namun belum optimal dalam peningkatan kualitas aparatur desa di kabupaten murung raya (Aprilianto Prasetyo, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dilihat dari aspek penelitian yang ada, persamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama tentang Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan pembinaan Desa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokus penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu berada di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Murung Raya. Sedangkan lokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu. Perbedaan yang lain yaitu teori yang digunakan antara Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori T.R Michell dalam Sedarmayanti (2010) sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori Mustopadjaja (2003)

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk medeskripsikan kinerja meningkatkan pembinaan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kinerja dalam meningkatkan kualitas pembinaan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengatasi permasalahan guna meningkatkan kualitas pembinaan desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif yang berdasar pada filsafat postpositivisme yang disajikan dengan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara deskriptif baik itu dalam bentuk kalimat maupun bahasa yang menggunakan metode alamiah. Dengan penelitian deskriptif seseorang dapat membuat gambaran suatu peristiwa dan gejala secara sistematis, faktual dan penyusunan yang akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas pembinaan kepada Desa.

Dalam hal pengumpulan data penulis akan menggunakan metode wawancara, menelaah dokumen, melakukan *focus group discussion*, triangulasi data, dan observasi. penulis menggunakan metode wawancara semistruktur. Alasan menggunakan wawancara semistruktur adalah karena penulis ingin mengambil data sebanyak-banyaknya terkait dengan fenomena yang diamati pada lokasi penelitian. Metode wawancara ini memungkinkan penulis mendapatkan data-data dengan cara informal sehingga diharapkan informan dapat memberi informasi dengan lebih santai dan leluasa tanpa merasa terbebani ketika menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan, tetapi tetap sesuai dengan prosedur atau arah pembicaraan yang sesuai struktur atau pedoman yang telah ditetapkan agar hasil tanya jawab tidak terlalu melebar ke obrolan yang mungkin tidak sesuai dengan fokus permasalahan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan teori dari Mustopadijaja yang menyatakan bahwa penilaian kinerja organisasi terdapat enam tahap, yaitu kinerja, Proses, Output, Outcome, Benefit, Impact. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam peningkatan pembinaan Desa adalah dengan melaksanakan evaluasi kembali dan melakukan koordinasi kembali terkait peningkatan pembinaan desa demi tercapainya tujuan utama yaitu menjadikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kabupaten tanpa Desa Tertinggal. Akan tetapi masih ada kelemahan dalam berkordinasi antara perangkat Desa, Fasilitator, dengan DPMD. Seperti kurangnya pemahaman penata usahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pembangunan tidak terlaksana dengan baik.

3.2 Proses

Desa Kampung Bunga dan desa Kampung Kuantan Tenang adalah dua Desa dari 11 Desa yang masih banyak permasalahan yang harus ditangani dari mendapat perhatian penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah agar statusnya tidak lagi masuk kategori Desa tertinggal. Padahal suatu kegiatan tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mendapat perhatian khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintahan. Penambahan dari segi kualitas dan kuantitas Aparatur juga perlu ditingkatkan dalam hal ini besaran tunjangan kerja karena beban kerja melebihi kapasitas kerja dan perlu dikordinasikan dengan pihak terkait untuk mencapai kinerja di inginkan.

3.3 Output

DPMD sangat mengharapkan tahun 2023 tidak ada lagi Desa yang tertinggal, pihak DPMD telah melaksanakan sosialisasi berulang kali dengan harapan yang sama

kedepannya, hanya saja ada beberapa kendala seperti untuk menaikkan status desa hendaknya memenuhi 3 kriteria penilaian yaitu dari aspek Indeks ketahanan ekologi, Indeks ketahanan ekonomi, dan Indeks ketahanan sosial, ketiga hal di atas sangat berpengaruh dalam penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga menjadi persoalan utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan status Desa.

3.4 Outcome

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa faktor eksternal yang menyebabkan misscommunication antara pihak Dinas dengan Pemerintahan desa. Dan juga pembangunan infrastruktur Desa yang terhambat oleh akses jalan yang memang sulit untuk dilewati.

3.5 Benefit

manfaat kerja yang diperoleh Dinas PMD sudah cukup baik melihat banyaknya pendapat positif yang diberikan namun masih terdapat kendala yang harus dibenahi yaitu salah satunya adalah sarana prasana dari Dinas PMD yang masih Kurang. Sehingga Ketepatan waktu Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas masih belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas PMD salah satunya sarana prasana yang belum memadai serta kondisi jalan yang rusak.

3.6 Impact

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu memiliki Visi dan Misi yang sangat kuat yaitu menjadikan Kabupaten Indragiri Hulu tanpa desa tertinggal dan dapat menjadi kabupaten percontohan untuk sektor pembinaan desa serta meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi terhadap pembinaan desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja DPMD sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. DPMD ditugaskan mendampingi pemerintah desa dari mulai tahap perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta meningkatkan kapasitas bagi pemerintahan desa, dan juga lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bisa membantu pihak desa dalam kualitas pembinaan desa, baik dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Secara tidak langsung dinas pemberdayaan masyarakat dan desa telah membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah desa yang baik. Terdapat enam dimensi dalam Kinerja DPMD terhadap meningkatkan kualitas pembinaan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu input, proses, output, outcome, benefit dan impact.

IV. KESIMPULAN

Kinerja DPMD sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. DPMD ditugaskan mendampingi pemerintah desa dari mulai tahap perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta meningkatkan kapasitas bagi pemerintahan desa, dan juga lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bisa membantu pihak desa dalam kualitas pembinaan desa, baik dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Secara tidak langsung dinas pemberdayaan masyarakat dan desa telah membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah desa yang baik. Terdapat enam dimensi dalam Kinerja DPMD terhadap meningkatkan kualitas pembinaan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu *input*, *proses*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu telah baik hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi halangan yaitu akses menuju desa yang sulit dan juga sudah dilakukan pelaporan beberapa kali laporan belum ada kelanjutannya dan faktor sarana prasarana. Padahal Sarana dan prasarana ini nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas. Kurangnya koordinasi antara DPMD dengan Desa dan pihak yang terkait dengan tujuan untuk membangun Desa yang tertinggal. Kurangnya perhatian dari Pemerintah pusat maupun Daerah dalam menangani kasus seperti ini, padahal Desa tertinggal seharusnya mendapatkan perhatian Khusus dari Pemerintah pusat maupun Daerah dalam membangun dan meningkatkan status desanya.

Dalam rangka upaya mengatasi hambatan kinerja DPMD dalam peningkatan kualitas pembinaan desa terdapat beberapa hal yang biasa dilaksanakan yakni kepala DPMD memberikan permohonan kepada Bupati agar dapat memberikan tambahan Sarana dan Prasarana sebagai salah satu penunjang tugas dan fungsi, dengan ketentuan seperti penambahan kendaraan, sarana perbaikan jalan yang rusak, sarana Gedung kantor yang lebih luas dan pemeliharaan rutin. Melakukan sosialisasi kepada Desa-Desa yang tertinggal tentang peraturan dan Aspek Aspek yang menjadi syarat dalam meningkatkan status Desa.

Keterbatasan Penelitian. Faktor yang mempengaruhi peneliti dalam melakukan penelitian yaitu waktu dan keterbatasan akses menuju ke Desa yang tertinggal. Serta sulitnya melakukan komunikasi Bersama Masyarakat desa terkait dikarenakan masih tertinggal jauhnya perkembangan teknologi di Desa tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan penelitian yang penulis buat dan disarankan dapat dilakukan penelitian lanjutan pada permasalahan kualitas pembinaan desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama diberikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mensukseskan penelitian yang dilaksanakan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Mustopadjaja AR (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik Sedarmayanti. 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV Mandar Maju, Bandung

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu

<http://eprints.ipdn.ac.id/6234/>

<http://eprints.ipdn.ac.id/8873/1/KINERJA%20APARATUR%20DINAS%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20DAN%20DESA%20DALAM%20PENINGKATAN%20KUALITAS%20APARATUR%20DESA%20DI%20KABUPATEN%20MURUNG%20ORAYA.pdf>

<https://siberone.com/news/detail/21985/dpmd-catat-87-desa-tertinggal-di-riau-32-ada-di-kabupaten-inhil>

